

**INSTRUMEN PENILAIAN DAMPAK DESA/NAGARI DAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA
PADA ASPEK KORBAN DAN KERUGIAN**

METODE:

Pengambilan data untuk pengisian formulir ini dilakukan melalui data sekunder dan laporan kejadian bencana dari desa/kelurahan.

INSTRUMEN PENILAIAN:

Desa/Kelurahan:	
Kecamatan:	
Kabupaten/Kota:	
Provinsi:	
Jumlah penduduk: Laki-laki Perempuan Anak-anak Penyandang disabilitas
Tanggal:	

Aspek Dampak Berupa Korban Bencana:

	Kapan Bencana terakhir terjadi: Tahun	Kapan Bencana sebelumnya terjadi: Tahun
Jenis bencana:		
Jumlah korban meninggal: Laki-laki Perempuan Anak-anak Penyandang disabilitas Laki-laki Perempuan Anak-anak Penyandang disabilitas
Jumlah korban luka berat:	Laki-laki Perempuan Anak-anak Penyandang disabilitas	Laki-laki Perempuan Anak-anak Penyandang disabilitas
Jumlah korban luka ringan:	Laki-laki Perempuan Anak-anak Penyandang disabilitas	Laki-laki Perempuan Anak-anak Penyandang disabilitas

Aspek Dampak Berupa Kerugian akibat Bencana:

	Kapan Bencana terakhir terjadi: Tahun	Kapan Bencana sebelumnya terjadi: Tahun
Jenis bencana:		
Jumlah kerusakan berat rumah masyarakat:	rumah	rumah
Jumlah kerusakan sedang rumah masyarakat:	rumah	rumah
Jumlah kerusakan ringan rumah masyarakat:	rumah	rumah
Jumlah nilai kerusakan infrastruktur:	Rp.	Rp.
Jumlah kerugian ekonomi masyarakat:	Rp.	Rp.

**KUESIONER SURVEI DAMPAK
PROGRAM DESA/NAGARI/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
PADA ASPEK PERILAKU**

METODE PENGGUNAAN INSTRUMEN:

Instrumen penilaian dampak dari kegiatan terkait Desa/Nagari dan Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA/NAGTANA dan KATANA) digunakan dengan metode survey individu (sekurang-kurangnya 20 individu) yang dapat mewakili rumah tangga, baik itu individu sebagai pemerintah desa, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, lembaga masyarakat desa Relawan Desa, Tokoh masyarakat/agama/adat, **kelompok perempuan, kelompok pemuda dan anak, kelompok penyandang disabilitas dan lansia**, kelompok tani/nelayan/pedagang/industri, dan perwakilan lembaga lain di desa/kelurahan.

Kegiatan survey ini dapat dilakukan oleh 1-2 orang dengan tugas melakukan survey dan mencatat hasil survey.

Pewawancara dapat berasal dari unsur perwakilan pemerintah desa, masyarakat, kader desa dan jika diperlukan juga dari pihak luar desa dari unsur pemerintah dan lembaga non pemerintah dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya manusia dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda dan lansia yang bertujuan melakukan penilaian dampak dari kegiatan terkait ketangguhan desa dan kelurahan secara inklusif.

Penilaian mandiri oleh pihak desa dan kelurahan bersama masyarakatnya diutamakan dengan melaporkan informasi hasil-hasil penilaian kepada BPBD Kabupaten/Kota.

Tanggal Wawancara : _____

Nomor Kuesioner :

Desa/Nagari/Kelurahan* : _____

Kecamatan : _____

Kabupaten/Kota* : _____

Provinsi : _____

PENGANTAR

Perkenalkan, nama saya Saya mendapatkan tugas dari:

**pilih kolom yang sesuai dengan penugasan!*

Pemerintah Desa/Nagari/Kelurahan..... Kabupaten/Kota.....	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.....	Organisasi..... di Desa/Nagari/Kelurahan/ Kabupaten/Kota
--	--	--

untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu/Saudara terkait dengan dampak kegiatan Desa/Nagari dan Kelurahan Tangguh Bencana . Informasi tersebut akan menjadi masukan penting dalam evaluasi dan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Kami mengucapkan banyak terimakasih atas kontribusi Anda dalam survei ini.

1. PROFIL RESPONDEN

1.1	Nama Lengkap	
1.2	Jenis kelamin	1 <input type="checkbox"/> Laki-laki 2 <input type="checkbox"/> Perempuan
1.3	Kesulitan fungsi kerja tubuh terkait disabilitas <i>(bisa 1 atau lebih dari 1 kesulitan)</i>	1 <input type="checkbox"/> Melihat 2 <input type="checkbox"/> Mendengar 3 <input type="checkbox"/> Berjalan

- 4 harta-benda rusak, butuh waktu 1-3 bulan untuk menggantinya
- 5 harta-benda rusak, butuh waktu 4-6 bulan untuk menggantinya
- 6 harta-benda rusak, butuh waktu 7-12 bulan untuk menggantinya
- 7 harta-benda rusak, butuh waktu lebih dari 1 tahun untuk menggantinya

2.18. Setelah kejadian bencana yang menimpa keluarga Anda, berapa lama Anda bisa melakukan kembali pekerjaan Anda yang terganggu oleh bencana?

- 1 pekerjaan tidak terhenti karena bencana
- 2 pekerjaan terhenti, butuh waktu 1-2 minggu untuk bisa bekerja kembali
- 3 pekerjaan terhenti, butuh waktu 3-4 minggu untuk bisa bekerja kembali
- 4 pekerjaan terhenti, butuh waktu 1-3 bulan untuk bisa bekerja kembali
- 5 pekerjaan terhenti, butuh waktu 4-6 bulan untuk bisa bekerja kembali
- 6 pekerjaan terhenti, butuh waktu 7-12 bulan untuk bisa bekerja kembali
- 7 pekerjaan terhenti, butuh waktu lebih dari 1 tahun untuk bisa bekerja kembali

2.19. Menurut Anda, adakah anggota keluarga Anda yang termasuk dalam kelompok berisiko tinggi terhadap ancaman bencana di desa/kelurahan ini?

- 1 Ya
- 2 Tidak (*langsung ke pertanyaan nomor 2.22*)

2.20. Kalau "Ya", adakah anggota keluarga dan termasuk Anda masuk dalam kelompok berikut? (*boleh pilih lebih dari satu*)

- ① tinggal di lokasi rawan bencana
- ② kondisi dan struktur bangunan rumah yang rawan bencana
- ③ penyandang disabilitas, dengan 1 atau lebih dari 1 kesulitan fungsi: Melihat, Mendengar, Berjalan, Mengingat, Merawat diri, Berkomunikasi dengan bahasa sehari-hari, Menggunakan tangan/jari
- ④ orang lanjut usia, jiwa
- ⑤ anak-anak, jiwa
- ⑥ perempuan, jiwa
- ⑦ rumah tangga miskin
- ⑧ kelompok minoritas secara Ras/Suku/Agama
- ⑨ lainnya:

2.21. Adakah anggota keluarga Anda yang pernah mengikuti kegiatan terkait pengurangan risiko bencana di desa/kelurahan?

- 1 Ada, yaitu
- 2 Tidak ada

2.22. Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan terkait pengurangan risiko bencana di desa/kelurahan?

- 1 Tidak pernah (*lanjut ke pertanyaan 2.26*)
- 2 Pernah 1-2 kali
- 3 Pernah 3-5 kali
- 4 Pernah 6-8 kali
- 5 Pernah 9-10 kali
- 6 Pernah lebih dari 10 kali

2.23. Dalam kegiatan tersebut, apakah Anda pernah menyampaikan usulan atau pendapat?

- 1 Tidak pernah
- 2 Beberapa Kali
- 3 Selalu usul atau berpendapat

2.24. Apakah Anda pernah ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan terkait kegiatan penanggulangan bencana di desa/kelurahan?

- 1 Tidak pernah (*pertanyaan selesai*)
- 2 Beberapa kali
- 3 Selalu

2.25. Apa peran Anda dalam pengambilan keputusan tersebut?

2.26. Menurut Anda jika bencana kedepan terjadi, bagaimana kondisi Anda dan keluarga Anda untuk menghadapi bencana?

- 1 Sudah siapsiaga
- 2 masih perlu berlatih/menyiapkan diri
- 2 belum siap

Catatan informasi lainnya dari responden:

3. PROFIL PEWAWANCARA

3.1	Nama Lengkap	
3.2	Jenis kelamin	1 <input type="checkbox"/> Laki-laki 2 <input type="checkbox"/> Perempuan
3.3	Kesulitan fungsi kerja tubuh terkait disabilitas <i>(bisa 1 atau lebih dari 1 kesulitan fungsi berdasar pengalaman aktivitas social keseharian responden baik itu pada tingkat sedikit/banyak kesulitan/tidak bisa melakukan sama sekali)</i>	1 <input type="checkbox"/> Melihat 2 <input type="checkbox"/> Mendengar 3 <input type="checkbox"/> Berjalan 4 <input type="checkbox"/> Mengingat 5 <input type="checkbox"/> Merawat Diri 6 <input type="checkbox"/> Berkomunikasi dengan bahasa sehari-hari 7 <input type="checkbox"/> Menggunakan tangan/jari
3.4	Usia	
3.5	Pendidikan terakhir	1 <input type="checkbox"/> Tidak tamat SD 2 <input type="checkbox"/> Tamat SD 3 <input type="checkbox"/> Tamat SLTP 4 <input type="checkbox"/> Tamat SLTA 5 <input type="checkbox"/> Sarjana (Diploma/S1) 6 <input type="checkbox"/> Pasca Sarjana (S2/S3)
3.6	Organisasi/Lembaga Pewawancara	
3.7	Tanda Tangan Pewawancara	

Format Pengumpulan Cerita

Kerahasiaan

Kami mungkin akan menggunakan cerita Anda sebagai bahan laporan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Apakah Anda, (sebagai pencerita):

- Bersedia nama Anda disebutkan di dalam cerita (pilih satu) Ya Tidak
- Memberi izin kepada kami untuk mempublikasikan (pilih satu) Ya Tidak

Tanda tangan pencerita

(-----)

Rincian Kontak¹

Nama pencerita :

Hubungan dengan DESTANA :

Telepon :

Jenis kelamin :

Usia :

Kesulitan fungsi tubuh (disabilitas) :

Nama orang yang mencatat cerita :

Hubungan dengan DESTANA :

Telepon :

Jenis kelamin :

Usia :

Kesulitan fungsi tubuh (disabilitas) :

Lokasi :

(nama desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi)

Tanggal pencatatan :

Pertanyaan

1. Ceritakan bagaimana Anda (pencerita) dapat terlibat dalam program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ?

¹ Jika mereka tidak ingin diketahui namanya, jangan mencatat nama ataupun rincian kontak mereka. Cukup tuliskan "anggota kelompok", "warga masyarakat", atau deskripsi serupa.

2. Menengok 2 tahun ke belakang, perubahan-perubahan apa yang sudah terjadi pada Anda atau komunitas Anda dengan adanya program ini?

3. Di antara perubahan-perubahan itu, mana yang menurut Anda paling penting? (pilih satu perubahan yang terpenting)

Mengapa hal itu penting?

4. Bagaimana perubahan tersebut terjadi?
Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan itu?

5. Menurut Anda, bagaimana perubahan itu akan bermanfaat bagi pekerjaan / peran Anda di masa yang akan datang?

(Kalau diperbolehkan, ambil fotonya pencerita dalam keadaan santai)

**INSTRUMEN EVALUASI DESA/NAGARI/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
FOCUS GROU DISCUSSION (FGD) KABUPATEN/KOTA
OLEH: POKJA PROVINSI SUMATERA BARAT**

METODE PENGGUNAAN INSTRUMEN:

Instrumen evaluasi Desa/Nagari/Kelurahan Tangguh Bencana digunakan dengan metode diskusi bersama organisasi pemerintah daerah (OPD) Kabupaten/Kota, organisasi penyandang disabilitas (OPDis), dan perwakilan lembaga lain yang terkait di kabupaten/kota. Keseluruhan peserta antara 15 – 20 orang, dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan dan penyandang disabilitas serta kelompok berisiko tinggi lainnya.

Alur diskusi evaluasi kabupaten/kota ialah:

1. Peserta diskusi dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut:
 - a. Kelompok 1: Diskusi penilaian kinerja fasilitator
 - b. Kelompok 2: Diskusi kerjasama antara OPD dan dengan OPDis
 - c. Kelompok 3: Diskusi sinkronisasi kebijakan desa/kelurahan dengan kabupaten/kota dan kerjasama antara kabupaten/kota dengan provinsi
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan untuk memberikan skor atas skala ukuran indikator dengan memberikan bukti/keterangan sebagai dasar pemberian skor tersebut.
3. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penilaiannya di depan seluruh peserta
4. Nilai akhir yang merupakan nilai yang disepakati bersama untuk menjadi nilai indikator tersebut.
5. Hasil penilaian direkap untuk mendapatkan hasil penilaian secara keseluruhan indikator pelaksanaan desa/kelurahan tangguh bencana di tingkat kabupaten/kota.
6. Untuk pertanyaan rekomendasi, didiskusikan bersama di akhir sesi setelah semua penilaian indikator selesai.

Fasilitator:

Kegiatan diskusi ini perlu difasilitasi oleh 2 orang dengan tugas memfasilitasi diskusi kelompok dan diskusi bersama untuk membuat kesepakatan hasil penilaian pelaksanaan program DESTANA di kabupaten/kota.

INSTRUMEN PENILAIAN:

Kabupaten/Kota:	
Provinsi:	
Peserta FGD:	
Fasilitator FGD:	
Tanggal:	
Tempat FGD:	

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-5)	BUKTI/KETERANGAN
1	Kinerja Fasilitator	0. Fasilitator tidak memahami substansi DESTANA 1. Fasilitator hanya memahami sebagian substansi DESTANA, dan tidak mampu memfasilitasi secara partisipatif dan tidak mampu mengakomodir keragaman peserta 2. Fasilitator memahami substansi DESTANA dengan baik, tetapi tidak bisa memfasilitasi secara partisipatif dan tidak mampu mengakomodir keragaman peserta serta kreatif dalam penyampaian 3. Fasilitator memahami substansi DESTANA dengan baik, bisa memfasilitasi secara partisipatif dan mampu mengakomodir keragaman peserta, tetapi kurang kreatif dalam penyampaian 4. Fasilitator memahami substansi DESTANA dengan baik, bisa memfasilitasi secara partisipatif dan mampu mengakomodir keragaman peserta serta kreatif dalam penyampaian. 5. Perwakilan kelompok berisiko dan penyandang disabilitas menjadi fasilitator yang memahami substansi DESTANA dengan baik, bisa memfasilitasi secara partisipatif dan mampu mengakomodir keragaman peserta serta kreatif dalam penyampaian.		
2	Kerjasama antar OPD Kab/Kota	0. Tidak ada sama sekali kegiatan OPD Kab/Kota untuk mewujudkan DESTANA selain dari BPBD 1. Kegiatan OPD Kab/Kota untuk DESTANA masih berjalan sendiri-sendiri dan		Bentuk kerjasama antar OPD yang sudah dilakukan: 1.

		<p>belum ada kerjasama</p> <p>2. Sudah ada kerjasama pelaksanaan kegiatan, tetapi baru terbatas antara 2-4 OPD Kab/Kota saja dan kegiatan belum intensif dilakukan</p> <p>3. Kerjasama pelaksanaan kegiatan DESTANA sudah melibatkan kerjasama lebih dari 5 OPD Kab/Kota dan kegiatan sudah cukup intensif dilakukan</p> <p>4. Pelaksanaan kerjasama antar OPD Kab/Kota telah menghasilkan dampak program yang lebih besar di masyarakat desa/kelurahan yang ditunjukkan dengan banyaknya indikator DESTANA yang dicapai</p> <p>5. Pelaksanaan kerjasama antar OPD Kab/Kota yang terkoordinasi dan terlegalisasi secara berkelanjutan sehingga menghasilkan dampak program yang lebih besar di masyarakat desa/kelurahan yang ditunjukkan dengan banyaknya indikator DESTANA yang dicapai.</p>		<p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>
3	Kerjasama OPD dengan OPDis	<p>0. OPDis belum pernah dilibatkan dalam kerjasama dengan OPD untuk pelaksanaan DESTANA</p> <p>1. OPDis sudah dilibatkan dalam kegiatan OPD untuk pelaksanaan DESTANA, tetapi masih terbatas pada kehadiran dan belum ada kerjasama pelaksanaan kegiatan bersama</p> <p>2. OPDis dan OPD sudah ada kerjasama pelaksanaan kegiatan DESTANA, tetapi masih terbatas pada kerjasama pelaksanaan kegiatan saja, dan belum mencakup juga perencanaan dan evaluasinya</p> <p>3. OPDis dan OPD sudah melakukan kerjasama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan DESTANA, tetapi belum dilakukan secara intensif dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan</p> <p>4. OPDis dan OPD sudah melakukan kerjasama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan DESTANA, dan sudah dilakukan secara intensif dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan</p> <p>5. OPDis dan OPD sudah melakukan kerjasama yang terwadahi dalam kelembagaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Penanggulangan Bencana dan sudah melakukan kerjasama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan DESTANA, dan sudah dilakukan secara intensif dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan</p>		<p>Bentuk kerjasama antara OPD dan OPDis yang sudah dilakukan:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>

4	Singkronisasi kebijakan desa/kelurahan dengan kabupaten/kota	<p>0. Kebijakan desa/kelurahan terkait dengan DESTANA belum pernah disinkronkan dengan kebijakan terkait di kabupaten/kota</p> <p>1. Baru terdapat satu kebijakan desa/kelurahan yang disinkronkan dengan kebijakan kabupaten/kota terkait dengan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana dan baru dilakukan untuk sedikit desa di lokasi rawan bencana</p> <p>2. Terdapat dua atau lebih kebijakan desa/kelurahan yang disinkronkan dengan kebijakan kabupaten/kota, selain yang terkait dengan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, dan juga terkait dengan rencana penanggulangan bencana atau rencana kesiapsiagaan bencana, tetapi baru dilakukan untuk sebagian kecil desa/kelurahan di lokasi rawan bencana</p> <p>3. Terdapat dua atau lebih kebijakan desa/kelurahan yang disinkronkan dengan kebijakan kabupaten/kota, selain yang terkait dengan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, dan juga terkait dengan rencana penanggulangan bencana atau rencana kesiapsiagaan bencana, serta sudah dilakukan untuk sebagian besar desa/kelurahan di lokasi rawan bencana</p> <p>4. Singkronisasi kebijakan desa/kelurahan dengan kebijakan kabupaten/kota tidak hanya dilakukan pada bidang penanggulangan bencana saja, tetapi juga sudah dilakukan untuk hampir semua sektor yang terkait dengan penanggulangan bencana</p> <p>5. Singkronisasi kebijakan desa/kelurahan dengan kebijakan kabupaten/kota tidak hanya dilakukan pada bidang penanggulangan bencana saja, tetapi juga sudah dilakukan untuk hampir semua sektor termasuk sektor inklusi yang terkait dengan penanggulangan bencana</p>		<p>Bentuk kebijakan yang sudah disinkronisasikan:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>
5	Kerjasama Kab/Kota dengan Provinsi	<p>0. Belum ada kerjasama sama sekali antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi untuk mewujudkan DESTANA</p> <p>1. Sudah ada kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi untuk mewujudkan DESTANA, tetapi masih terbatas pada dukungan dana dari provinsi saja</p> <p>2. Sudah ada kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi untuk mewujudkan DESTANA, tidak hanya dukungan dana, tetapi juga dalam</p>		<p>Bentuk kerjasama kabupaten/kota dengan provinsi:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>

		<p>bentuk pelaksanaan kegiatan bersama di desa/kelurahan</p> <p>3. Sudah ada kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi untuk mewujudkan DESTANA, tidak hanya pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada tahapan perencanaan dan evaluasi bersama</p> <p>4. Hasil kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, selain menghasilkan program DESTANA, juga menghasilkan kebijakan provinsi untuk mendukung pewujudan DESTANA secara merata di semua wilayah rawan bencana</p> <p>5. Hasil kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, selain menghasilkan program DESTANA, juga menghasilkan kebijakan provinsi untuk mendukung pewujudan DESTANA berprinsip inklusi secara merata di semua wilayah rawan bencana.</p>		
6	Rekomendasi untuk perbaikan program	Apa rekomendasi untuk perbaikan program DESTANA berprinsip Inklusi ke depan?		
7	Rekomendasi untuk perbaikan/usulan kebijakan pemerintah	Apa rekomendasi untuk perbaikan atau usulan baru kebijakan pemerintah yang bisa mendorong terwujudnya DESTANA berprinsip Inklusi di semua wilayah rawan bencana?		

**INSTRUMEN EVALUASI DESA/NAGARI/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
FOCUS GROU DISCUSSION (FGD) KABUPATEN/KOTA
OLEH: POKJA PROVINSI SUMATERA BARAT**

METODE PENGGUNAAN INSTRUMEN:

Instrumen evaluasi Desa/Nagari/Kelurahan Tangguh Bencana digunakan dengan metode diskusi bersama organisasi pemerintah daerah (OPD) Kabupaten/Kota, organisasi penyandang disabilitas (OPDis), dan perwakilan lembaga lain yang terkait di kabupaten/kota. Keseluruhan peserta antara 15 – 20 orang, dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan dan penyandang disabilitas serta kelompok berisiko tinggi lainnya.

Alur diskusi evaluasi kabupaten/kota ialah:

1. Peserta diskusi dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut:
 - a. Kelompok 1: Diskusi penilaian kinerja fasilitator
 - b. Kelompok 2: Diskusi kerjasama antara OPD dan dengan OPDis
 - c. Kelompok 3: Diskusi sinkronisasi kebijakan desa/kelurahan dengan kabupaten/kota dan kerjasama antara kabupaten/kota dengan provinsi
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan untuk memberikan skor atas skala ukuran indikator dengan memberikan bukti/keterangan sebagai dasar pemberian skor tersebut.
3. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penilaiannya di depan seluruh peserta
4. Nilai akhir yang merupakan nilai yang disepakati bersama untuk menjadi nilai indikator tersebut.
5. Hasil penilaian direkap untuk mendapatkan hasil penilaian secara keseluruhan indikator pelaksanaan desa/kelurahan tangguh bencana di tingkat kabupaten/kota.
6. Untuk pertanyaan rekomendasi, didiskusikan bersama di akhir sesi setelah semua penilaian indikator selesai.

Fasilitator:

Kegiatan diskusi ini perlu difasilitasi oleh 2 orang dengan tugas memfasilitasi diskusi kelompok dan diskusi bersama untuk membuat kesepakatan hasil penilaian pelaksanaan program DESTANA di kabupaten/kota.

INSTRUMEN PENILAIAN:

Kabupaten/Kota:	
Provinsi:	
Peserta FGD:	
Fasilitator FGD:	
Tanggal:	
Tempat FGD:	

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-4)	BUKTI/KETERANGAN
1	Kinerja Fasilitator	<ol style="list-style-type: none">0. Fasilitator tidak memahami substansi DESTANA1. Fasilitator hanya memahami sebagian substansi DESTANA, dan tidak mampu memfasilitasi secara partisipatif dan tidak mampu mengakomodir keragaman peserta2. Fasilitator memahami substansi DESTANA dengan baik, tetapi tidak bisa memfasilitasi secara partisipatif dan tidak mampu mengakomodir keragaman peserta serta kreatif dalam penyampaian3. Fasilitator memahami substansi DESTANA dengan baik, bisa memfasilitasi secara partisipatif dan mampu mengakomodir keragaman peserta, tetapi kurang kreatif dalam penyampaian4. Fasilitator memahami substansi DESTANA dengan baik, bisa memfasilitasi secara partisipatif dan mampu mengakomodir keragaman peserta serta kreatif dalam penyampaian.5. Perwakilan kelompok berisiko dan penyandang disabilitas menjadi fasilitator yang memahami substansi DESTANA dengan baik, bisa memfasilitasi secara partisipatif dan mampu mengakomodir keragaman peserta serta kreatif dalam penyampaian.		
2	Kerjasama antar OPD Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none">0. Tidak ada sama sekali kegiatan OPD Kab/Kota untuk mewujudkan DESTANA selain dari BPBD1. Kegiatan OPD Kab/Kota untuk DESTANA masih berjalan sendiri-sendiri dan		Bentuk kerjasama antar OPD yang sudah dilakukan: 1.

		<p>belum ada kerjasama</p> <p>2. Sudah ada kerjasama pelaksanaan kegiatan, tetapi baru terbatas antara 2-4 OPD Kab/Kota saja dan kegiatan belum intensif dilakukan</p> <p>3. Kerjasama pelaksanaan kegiatan DESTANA sudah melibatkan kerjasama lebih dari 5 OPD Kab/Kota dan kegiatan sudah cukup intensif dilakukan</p> <p>4. Pelaksanaan kerjasama antar OPD Kab/Kota telah menghasilkan dampak program yang lebih besar di masyarakat desa/kelurahan yang ditunjukkan dengan banyaknya indikator DESTANA yang dicapai</p> <p>5. Pelaksanaan kerjasama antar OPD Kab/Kota yang terkoordinasi dan terlegalisasi secara berkelanjutan sehingga menghasilkan dampak program yang lebih besar di masyarakat desa/kelurahan yang ditunjukkan dengan banyaknya indikator DESTANA yang dicapai.</p>		<p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>
3	Kerjasama OPD dengan OPDis	<p>0. OPDis belum pernah dilibatkan dalam kerjasama dengan OPD untuk pelaksanaan DESTANA</p> <p>1. OPDis sudah dilibatkan dalam kegiatan OPD untuk pelaksanaan DESTANA, tetapi masih terbatas pada kehadiran dan belum ada kerjasama pelaksanaan kegiatan bersama</p> <p>2. OPDis dan OPD sudah ada kerjasama pelaksanaan kegiatan DESTANA, tetapi masih terbatas pada kerjasama pelaksanaan kegiatan saja, dan belum mencakup juga perencanaan dan evaluasinya</p> <p>3. OPDis dan OPD sudah melakukan kerjasama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan DESTANA, tetapi belum dilakukan secara intensif dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan</p> <p>4. OPDis dan OPD sudah melakukan kerjasama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan DESTANA, dan sudah dilakukan secara intensif dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan</p> <p>5. OPDis dan OPD sudah melakukan kerjasama yang terwadahi dalam kelembagaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Penanggulangan Bencana dan sudah melakukan kerjasama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan DESTANA, dan sudah dilakukan secara intensif dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan</p>		<p>Bentuk kerjasama antara OPD dan OPDis yang sudah dilakukan:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>

4	Singkronisasi kebijakan desa/kelurahan dengan kabupaten/kota	<p>0. Kebijakan desa/kelurahan terkait dengan DESTANA belum pernah disinkronkan dengan kebijakan terkait di kabupaten/kota</p> <p>1. Baru terdapat satu kebijakan desa/kelurahan yang disinkronkan dengan kebijakan kabupaten/kota terkait dengan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana dan baru dilakukan untuk sedikit desa di lokasi rawan bencana</p> <p>2. Terdapat dua atau lebih kebijakan desa/kelurahan yang disinkronkan dengan kebijakan kabupaten/kota, selain yang terkait dengan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, dan juga terkait dengan rencana penanggulangan bencana atau rencana kesiapsiagaan bencana, tetapi baru dilakukan untuk sebagian kecil desa/kelurahan di lokasi rawan bencana</p> <p>3. Terdapat dua atau lebih kebijakan desa/kelurahan yang disinkronkan dengan kebijakan kabupaten/kota, selain yang terkait dengan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, dan juga terkait dengan rencana penanggulangan bencana atau rencana kesiapsiagaan bencana, serta sudah dilakukan untuk sebagian besar desa/kelurahan di lokasi rawan bencana</p> <p>4. Singkronisasi kebijakan desa/kelurahan dengan kebijakan kabupaten/kota tidak hanya dilakukan pada bidang penanggulangan bencana saja, tetapi juga sudah dilakukan untuk hampir semua sektor yang terkait dengan penanggulangan bencana</p> <p>5. Singkronisasi kebijakan desa/kelurahan dengan kebijakan kabupaten/kota tidak hanya dilakukan pada bidang penanggulangan bencana saja, tetapi juga sudah dilakukan untuk hampir semua sektor termasuk sektor inklusi yang terkait dengan penanggulangan bencana</p>		<p>Bentuk kebijakan yang sudah disinkronisasikan:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>
5	Kerjasama Kab/Kota dengan Provinsi	<p>0. Belum ada kerjasama sama sekali antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi untuk mewujudkan DESTANA</p> <p>1. Sudah ada kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi untuk mewujudkan DESTANA, tetapi masih terbatas pada dukungan dana dari provinsi saja</p> <p>2. Sudah ada kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi untuk mewujudkan DESTANA, tidak hanya dukungan dana, tetapi juga dalam</p>		<p>Bentuk kerjasama kabupaten/kota dengan provinsi:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>

		<p>bentuk pelaksanaan kegiatan bersama di desa/kelurahan</p> <p>3. Sudah ada kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi untuk mewujudkan DESTANA, tidak hanya pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada tahapan perencanaan dan evaluasi bersama</p> <p>4. Hasil kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, selain menghasilkan program DESTANA, juga menghasilkan kebijakan provinsi untuk mendukung pewujudan DESTANA secara merata di semua wilayah rawan bencana</p> <p>5. Hasil kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, selain menghasilkan program DESTANA, juga menghasilkan kebijakan provinsi untuk mendukung pewujudan DESTANA berprinsip inklusi secara merata di semua wilayah rawan bencana.</p>		
6	Rekomendasi untuk perbaikan program	Apa rekomendasi untuk perbaikan program DESTANA berprinsip Inklusi ke depan?		
7	Rekomendasi untuk perbaikan/usulan kebijakan pemerintah	Apa rekomendasi untuk perbaikan atau usulan baru kebijakan pemerintah yang bisa mendorong terwujudnya DESTANA berprinsip Inklusi di semua wilayah rawan bencana?		

INSTRUMEN EVALUASI PROSES PELAKSANAAN DESA/NAGARI/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

METODE PENGGUNAAN INSTRUMEN:

Instrumen evaluasi proses pelaksanaan Desa/Nagari/kelurahan Tangguh Bencana digunakan dengan metode diskusi bersama pemerintah desa, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, Relawan Desa, Tokoh masyarakat/agama/adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda dan anak, kelompok penyandang disabilitas, kelompok tani/nelayan/pedagang/industri, dan perwakilan lembaga lain di desa/nagari/kelurahan. Keseluruhan peserta antara 25 – 35 orang, dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan dan penyandang disabilitas serta kelompok berisiko lainnya. Diskusi ini dilaksanakan bersamaan dengan diskusi penilaian output dan outcome, yang ditempatkan pada sesi terakhir.

Alur diskusi evaluasi ialah:

1. Diskusi penilaian output dan outcome diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan diskusi evaluasi proses
2. Diskusi dilaksanakan secara terpisah dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan
3. Masing-masing kelompok mendiskusikan untuk memberikan skor atas skala ukuran indikator dengan memberikan bukti/keterangan sebagai dasar pemberian skor tersebut.
4. Nilai akhir yang merupakan nilai rata-rata dari hasil evaluasi dua kelompok tersebut menjadi nilai penilaian indikator tersebut.
5. Hasil penilaian direkap untuk mendapatkan hasil penilaian secara keseluruhan indikator proses pelaksanaan desa/kelurahan tangguh bencana.

Fasilitator:

Kegiatan diskusi ini perlu difasilitasi oleh 2 orang (laki-laki dan perempuan untuk 2 kelompok) dengan tugas memfasilitasi diskusi kelompok untuk membuat kesepakatan hasil penilaian proses pelaksanaan program.

INSTRUMEN PENILAIAN:

Desa/Nagari/Kelurahan:	
Kecamatan:	
Kabupaten/Kota:	
Provinsi:	
Peserta FGD:	Terlampir dalam daftar hadir
Fasilitator FGD:	1. Laki-laki/Perempuan 2. Laki-laki/Perempuan 3. Laki-laki/Perempuan 4. Laki-laki/Perempuan
Tanggal:	
Tempat FGD:	

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-5)	BUKTI/KETERANGAN
1	Tahapan pelaksanaan kegiatan DESTANA/NAGTANA/KATANA	0. Tidak ada rencana sama sekali untuk tahapan pelaksanaan kegiatan DESTANA/NAGTANA/KALTANA 1. Terdapat rencana tahapan pelaksanaan kegiatan, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai sama sekali 2. Terdapat rencana tahapan pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaannya sebagian kecil sesuai dengan rencananya 3. Terdapat rencana tahapan pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaannya sebagian besar sesuai dengan rencananya 4. Terdapat rencana tahapan pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaannya sesuai dengan rencananya, dan juga telah melibatkan kelompok berisiko termasuk penyandang disabilitas 5. Semua pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana tahapannya dan sebagian besar sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh BNPB		Apa saja urutan kegiatan pelaksanaan DESTANA? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
2	Dukungan sumberdaya dari	0. Tidak ada dukungan sumberdaya (dana/tenaga/konsumsi dll) sama sekali dari pihak di luar pelaksana program seperti kelompok masyarakat		Bentuk dukungan sumberdaya dari selain pelaksana program:

	semua pihak untuk pelaksanaan kegiatan DESTANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dukungan dari pemerintah desa/kelurahan atau kelompok masyarakat setempat hanya dalam bentuk kehadiran dalam kegiatan saja 2. Terdapat dukungan sumberdaya (dana/tenaga/konsumsi pertemuan) dalam jumlah kecil dari pemerintah desa/kelurahan atau kelompok masyarakat 3. Terdapat pembagian kontribusi sumberdaya kebutuhan pelaksanaan kegiatan DESTANA/NAGTANA antara pelaksana program dan pemerintah desa/nagari/kelurahan sebesar 50 % masing-masing 4. Terdapatnya dukungan dan kontribusi sumberdaya dari kelompok berisiko termasuk penyandang disabilitas 5. Sebagian besar sumberdaya (dana/tenaga/konsumsi dll) untuk pelaksanaan kegiatan DESTANA/NAGTANA disediakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat 		<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5.
3	Jumlah dan tingkat partisipasi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya, dalam pelaksanaan kegiatan DESTANA	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak ada keterlibatan (kehadiran) sama sekali dari penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya dalam pelaksanaan DESTANA 1. Terdapat keterlibatan (kehadiran) penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya dalam kegiatan DESTANA, tetapi masih di bawah 10 % dari total peserta dan mereka hanya sebatas hadir saja 2. Penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya sudah berani menyampaikan pendapatnya, tetapi hanya sesekali saja dan kurang aktif 3. Penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya sudah secara aktif menyampaikan pendapatnya dalam kegiatan DESTANA 4. Penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya sudah terlibat secara aktif dalam kelembagaan (relawan dan forum PRB) dan pengambilan keputusan di kegiatan DESTANA 5. Kelompok berisiko termasuk penyandang disabilitas terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan kegiatan DESTANA 		<ol style="list-style-type: none"> a. Penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya yang terlibat dalam kegiatan DESTANA: jumlah orang atau % dari total peserta b. Penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya yang aktif menyampaikan pendapat dalam kegiatan DESTANA: % dari kelompok ini yang mengikuti kegiatan c. Penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya yang aktif dalam kelembagaan dan pengambilan keputusan dalam kegiatan DESTANA: % dari kelompok ini yang mengikuti kegiatan
4	Pelaksanaan komitmen yang sudah dibuat	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak ada tindak lanjut sama sekali dari kesepakatan/komitmen yang dibuat selama kegiatan DESTANA, misalnya kegiatan Forum, kerja mitigasi dll 		<p>Bentuk-bentuk pelaksanaan komitmen/kesepakatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.

	selama kegiatan DESTANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesekapatan/komitmen dari pelaksanaan DESTANA hanya dilaksanakan oleh pengurus relawan/forum saja dan belum melibatkan anggota lainnya 2. Kesekapatan/komitmen dari pelaksanaan DESTANA hanya dilaksanakan oleh pengurus dan anggota relawan dan forum saja dan belum melibatkan masyarakat luas dan pemerintah desa/nagari/kelurahan 3. Kesekapatan/komitmen dari pelaksanaan DESTANA sudah dilaksanakan oleh seluruh anggota tim relawan dan forum serta pemerintah desa/kelurahan, tetapi belum melibatkan masyarakat luas 4. Kesekapatan/komitmen dari pelaksanaan DESTANA sudah dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat yang ada di desa/nagari/kelurahan 5. Kesekapatan/komitmen dari pelaksanaan DESTANA sudah dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat termasuk keterlibatan kempok berisiko dan penyandang disabilitas yang ada di desa/nagari/kelurahan 		<ol style="list-style-type: none"> 2. 3. 4. 5.
5	Kesesuaian pelaksanaan kegiatan DESTANA dengan aturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 0. Pelaksanaan kegiatan DESTANA sama sekali tidak mengacu pada panduan dari BNPB dan peraturan di desa/ nagari/kelurahan 1. Pelaksanaan kegiatan DESTANA masih kurang dari 20 % yang mengacu pada panduan dari BNPB dan peraturan di desa/ nagari/kelurahan 2. Pelaksanaan kegiatan DESTANA masih kurang dari 50 % yang mengacu pada panduan dari BNPB dan peraturan di desa/ nagari/kelurahan 3. Pelaksanaan kegiatan DESTANA masih kurang dari 70 % yang mengacu pada panduan dari BNPB dan peraturan di desa/ nagari/kelurahan 4. Sudah lebih dari 85 % pelaksanaan kegiatan DESTANA yang mengacu pada panduan dari BNPB dan peraturan di desa/kelurahan 5. Sudah lebih dari 85 % pelaksanaan kegiatan DESTANA yang mengacu pada panduan dari BNPB dan peraturan di desa/nagari/kelurahan serta berprinsip inklusi dengan memperhatikan peran aktif dan kebutuhan bagi kelompok berisiko termasuk penyandang disabilitas. 		<p>Bentuk kegiatan DESTANA yang sesuai panduan dari BNPB dan peraturan di desa/kelurahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5.
6	Tingkat aksesibilitas hasil program untuk penyandang	<ol style="list-style-type: none"> 0. Penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya sama sekali tidak bisa mendapatkan hasil dari kegiatan DESTANA 1. Masih kurang dari 20 % hasil kegiatan DESTANA yang memberikan akses kepada penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya 		<p>Bentuk hasil kegiatan DESTANA yang memberikan akses kepada penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.

	disabilitas dan kelompok berisiko lainnya	<p>2. Masih kurang dari 50 % hasil kegiatan DESTANA yang memberikan akses kepada penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya</p> <p>3. Masih kurang dari 70 % hasil kegiatan DESTANA yang memberikan akses kepada penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya</p> <p>4. Sudah lebih dari 85 % hasil kegiatan DESTANA yang memberikan akses kepada penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya</p> <p>5. Sudah lebih dari 85 % hasil kegiatan DESTANA yang memberikan akses kepada penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya secara berkelanjutan</p>		<p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>
7	Praktik baik dan Tantangan dalam melaksanakan kegiatan DESTANA	<p>a. Apa praktik baik dari pelaksanaan DESTANA di sini yang bisa dijadikan contoh bagi desa/kelurahan lainnya?</p> <p>b. Apa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan DESTANA di sini, dan bagaimana solusinya?</p>		<p>Praktik baik:</p> <p>Tantangan:</p> <p>Solusi dari tantangan:</p>

INSTRUMEN EVALUASI PROSES PELAKSANAAN DESA/NAGARI/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

METODE PENGGUNAAN INSTRUMEN:

Instrumen evaluasi proses pelaksanaan Desa/kelurahan Tangguh Bencana digunakan dengan metode diskusi bersama pemerintah desa, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, Relawan Desa, Tokoh masyarakat/agama/adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda dan anak, kelompok penyandang disabilitas, kelompok tani/nelayan/pedagang/industri, dan perwakilan lembaga lain di desa/kelurahan. Keseluruhan peserta antara 25 – 35 orang, dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan dan penyandang disabilitas serta kelompok berisiko lainnya. Diskusi ini dilaksanakan bersamaan dengan diskusi penilaian output dan outcome, yang ditempatkan pada sesi terakhir.

Alur diskusi evaluasi ialah:

1. Diskusi penilaian output dan outcome diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan diskusi evaluasi proses
2. Diskusi dilaksanakan secara terpisah dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan
3. Masing-masing kelompok mendiskusikan untuk memberikan skor atas skala ukuran indikator dengan memberikan bukti/keterangan sebagai dasar pemberian skor tersebut.
4. Nilai akhir yang merupakan nilai rata-rata dari hasil evaluasi dua kelompok tersebut menjadi nilai penilaian indikator tersebut.
5. Hasil penilaian direkap untuk mendapatkan hasil penilaian secara keseluruhan indikator proses pelaksanaan desa/kelurahan tangguh bencana.

Fasilitator:

Kegiatan diskusi ini perlu difasilitasi oleh 2 orang (laki-laki dan perempuan untuk 2 kelompok) dengan tugas memfasilitasi diskusi kelompok untuk membuat kesepakatan hasil penilaian proses pelaksanaan program.

INSTRUMEN PENILAIAN:

Desa/Nagari/Kelurahan:	
Kecamatan:	
Kabupaten/Kota:	
Provinsi:	
Peserta FGD:	
Fasilitator FGD:	
Tanggal:	
Tempat FGD:	

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-4)	BUKTI/KETERANGAN
1	Tahapan pelaksanaan kegiatan DESTANA	0. Tidak ada rencana sama sekali untuk tahapan pelaksanaan kegiatan DESTANA 1. Terdapat rencana tahapan pelaksanaan kegiatan, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai sama sekali 2. Terdapat rencana tahapan pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaannya sebagian kecil sesuai dengan rencananya 3. Terdapat rencana tahapan pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaannya sebagian besar sesuai dengan rencananya 4. Semua pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana tahapannya dan sebagian besar sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh BNPB		Apa saja urutan kegiatan pelaksanaan DESTANA? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
2	Dukungan sumberdaya dari semua pihak untuk pelaksanaan kegiatan	0. Tidak ada dukungan sumberdaya (dana/tenaga/konsumsi dll) sama sekali dari pihak di luar pelaksana program seperti kelompok masyarakat 1. Terdapat dukungan dari pemerintah desa/kelurahan atau kelompok masyarakat setempat hanya dalam bentuk kehadiran dalam kegiatan saja 2. Terdapat dukungan sumberdaya (dana/tenaga/konsumsi pertemuan)		Bentuk dukungan sumberdaya dari selain pelaksana program: 1. 2. 3.

	DESTANA	<p>dalam jumlah kecil dari pemerintah desa/kelurahan atau kelompok masyarakat</p> <p>3. Terdapat pembagian kontribusi sumberdaya kebutuhan pelaksanaan kegiatan DESTANA antara pelaksana program dan pemerintah desa/kelurahan sebesar 50 % masing-masing</p> <p>4. Sebagian besar sumberdaya (dana/tenaga/konsumsi dll) untuk pelaksanaan kegiatan DESTANA disediakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat</p>		<p>4.</p> <p>5.</p>
3	Jumlah dan tingkat partisipasi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya, dalam pelaksanaan kegiatan DESTANA	<p>0. Tidak ada keterlibatan (kehadiran) sama sekali dari penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya dalam pelaksanaan DESTANA</p> <p>1. Terdapat keterlibatan (kehadiran) penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya dalam kegiatan DESTANA, tetapi masih di bawah 10 % dari total peserta dan mereka hanya sebatas hadir saja</p> <p>2. Penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya sudah berani menyampaikan pendapatnya, tetapi hanya sesekali saja dan kurang aktif</p> <p>3. Penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya sudah secara aktif menyampaikan pendapatnya dalam kegiatan DESTANA</p> <p>4. Penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya sudah terlibat secara aktif dalam kelembagaan (relawan dan forum PRB) dan pengambilan keputusan di kegiatan DESTANA</p>		<p>a. Penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya yang terlibat dalam kegiatan DESTANA: jumlah orang atau % dari total peserta</p> <p>b. Penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya yang aktif menyampaikan pendapat dalam kegiatan DESTANA: % dari kelompok ini yang mengikuti kegiatan</p> <p>c. Penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya yang aktif dalam kelembagaan dan pengambilan keputusan dalam kegiatan DESTANA: % dari kelompok ini yang mengikuti kegiatan</p>
4	Pelaksanaan komitmen yang sudah dibuat selama kegiatan DESTANA	<p>0. Tidak ada tindak lanjut sama sekali dari kesepakatan/komitmen yang dibuat selama kegiatan DESTANA, misalnya kegiatan Forum, kerja mitigasi dll</p> <p>1. Kesepakatan/komitmen dari pelaksanaan DESTANA hanya dilaksanakan oleh pengurus relawan/forum saja dan belum melibatkan anggota lainnya</p> <p>2. Kesepakatan/komitmen dari pelaksanaan DESTANA hanya dilaksanakan oleh pengurus dan anggota relawan dan forum saja dan belum melibatkan masyarakat luas dan pemerintah desa/kelurahan</p>		<p>Bentuk-bentuk pelaksanaan komitmen/kesepakatan:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>

		<p>3. Kesekapatan/komitmen dari pelaksanaan DESTANA sudah dilaksanakan oleh seluruh anggota tim relawan dan forum serta pemerintah desa/kelurahan, tetapi belum melibatkan masyarakat luas</p> <p>4. Kesekapatan/komitmen dari pelaksanaan DESTANA sudah dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat yang ada di desa/kelurahan</p>		
5	Kesesuaian pelaksanaan kegiatan DESTANA dengan aturan yang berlaku	<p>0. Pelaksanaan kegiatan DESTANA sama sekali tidak mengacu pada panduan dari BNPB dan peraturan di desa/kelurahan</p> <p>1. Pelaksanaan kegiatan DESTANA masih kurang dari 20 % yang mengacu pada panduan dari BNPB dan peraturan di desa/kelurahan</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan DESTANA masih kurang dari 50 % yang mengacu pada panduan dari BNPB dan peraturan di desa/kelurahan</p> <p>3. Pelaksanaan kegiatan DESTANA masih kurang dari 70 % yang mengacu pada panduan dari BNPB dan peraturan di desa/kelurahan</p> <p>4. Sudah lebih dari 85 % pelaksanaan kegiatan DESTANA yang mengacu pada panduan dari BNPB dan peraturan di desa/kelurahan</p>		<p>Bentuk kegiatan DESTANA yang sesuai panduan dari BNPB dan peraturan di desa/kelurahan:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>
6	Tingkat aksesibilitas hasil program untuk penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya	<p>0. Penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya sama sekali tidak bisa mendapatkan hasil dari kegiatan DESTANA</p> <p>1. Masih kurang dari 20 % hasil kegiatan DESTANA yang memberikan akses kepada penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya</p> <p>2. Masih kurang dari 50 % hasil kegiatan DESTANA yang memberikan akses kepada penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya</p> <p>3. Masih kurang dari 70 % hasil kegiatan DESTANA yang memberikan akses kepada penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya</p> <p>4. Sudah lebih dari 85 % hasil kegiatan DESTANA yang memberikan akses kepada penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya</p>		<p>Bentuk hasil kegiatan DESTANA yang memberikan akses kepada penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>
7	Praktik baik dan Tantangan dalam melaksanakan kegiatan DESTANA	<p>a. Apa praktik baik dari pelaksanaan DESTANA di sini yang bisa dijadikan contoh bagi desa/kelurahan lainnya?</p> <p>b. Apa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan DESTANA di sini, dan bagaimana solusinya?</p>		<p>Praktik baik:</p> <p>Tantangan:</p> <p>Solusi dari tantangan:</p>

INSTRUMEN PENILAIAN CAPAIAN KELUARAN DAN HASIL DESA/NAGARI/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

METODE PENGGUNAAN INSTRUMEN:

Instrumen penilaian capaian keluaran (output) dan hasil (outcome) Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA dan KATANA) digunakan dengan metode diskusi bersama pemerintah desa, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, Relawan Desa, Tokoh masyarakat/agama/adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda dan anak, kelompok penyandang disabilitas dan lansia, kelompok tani/nelayan/pedagang/industri, dan perwakilan lembaga lain di desa/kelurahan. Keseluruhan peserta antara 25 – 35 orang.

Kegiatan diskusi ini perlu difasilitasi oleh 2-4 orang dengan tugas memfasilitasi diskusi kelompok dan juga diskusi bersama seluruh peserta untuk membuat kesepakatan hasil penilaian serta mencatat dan mendokumentasikan hasil-hasil diskusi.

Fasilitator diskusi dapat berasal dari unsur perwakilan pemerintah desa, masyarakat dan jika diperlukan juga dari pihak luar desa dari unsur pemerintah dan lembaga non pemerintah dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya manusia dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda dan lansia yang bertujuan melakukan penilaian ketangguhan desa dan kelurahan secara inklusif.

Penilaian mandiri oleh pihak desa dan kelurahan bersama masyarakatnya diutamakan dengan melaporkan informasi hasil-hasil penilaian kepada BPBD Kabupaten/Kota.

Alur diskusi penilaian ialah:

1. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok dengan fokus diskusi sebagai berikut:
 - a. Kelompok 1: indikator 1, 2, 3, dan 4
 - b. Kelompok 2: indikator 5, 6, 7, dan 14
 - c. Kelompok 3: indikator 8, 9, 10, 11, 12, dan 13
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan untuk memberikan skor atas skala ukuran indikator dengan memberikan bukti/keterangan sebagai dasar pemberian skor tersebut.
3. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penilaian indikator, dan dibahas serta didiskusikan bersama dengan kelompok lain. Nilai akhir yang disepakati bersama seluruh peserta menjadi nilai penilaian indikator tersebut.
4. Hasil penilaian direkap untuk mendapatkan hasil penilaian secara keseluruhan indikator capaian output dan outcome desa/kelurahan tangguh bencana.

INSTRUMEN PENILAIAN:

Desa/Nagarai/Kelurahan:	
Kecamatan:	
Kabupaten/Kota:	
Provinsi:	
Peserta FGD:	Terlampir dalam daftar hadir
Fasilitator FGD:	
Tanggal:	
Tempat FGD:	

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-4)	BUKTI/KETERANGAN LAINNYA
1	Regulasi terkait Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none">0. Tidak ada regulasi di desa/kelurahan yang mengatur tentang penanggulangan bencana1. Terdapat draf Peraturan Desa tentang Penanggulangan Bencana (untuk Kelurahan, terdapat draf SOP penanganan bencana sesuai Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana)2. Terbitnya Peraturan Desa tentang Penanggulangan Bencana yang sudah disahkan (untuk Kelurahan, terdapat Keputusan Lurah tentang SOP penanganan bencana sesuai dengan tugas kelurahan dalam Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana)3. Sebagian besar masyarakat desa/kelurahan, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sudah mengetahui Peraturan Desa atau Keputusan Lurah tersebut untuk penanggulangan bencana di desa/kelurahan4. Peraturan Desa atau Keputusan Lurah tersebut sudah digunakan sebagai rujukan legal untuk penyusunan rencana penanggulangan bencana, rencana kesiapsiagaan bencana, dan pengalokasian anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana		
2	Perencanaan PB:Penanggulangan	<ol style="list-style-type: none">0. Tidak ada rencana penanggulangan bencana di desa/kelurahan1. Tersedianya peta dan hasil kajian risiko bencana di desa/kelurahan yang		

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-4)	BUKTI/KETERANGAN LAINNYA
	Bencana	<p>dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dan juga sudah memasukan data terpilah</p> <p>2. Terdapat dokumen draf Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) desa/kelurahan yang sudah memasukan rencana aksi PRB</p> <p>3. Disahkannya dokumen RPB desa/kelurahan melalui Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Lurah</p> <p>4. Kegiatan rencana aksi dalam dokumen RPB sudah masuk dalam dokumen RPJMDesa atau RKP Desa atau rencana kegiatan tahunan Kelurahan</p>		
3	Perencanaan PB: Rencana Kesiapsiagaan Bencana	<p>0. Tidak ada rencana kesiapsiagaan bencana di desa/kelurahan</p> <p>1. Terdapat dokumen rencana kesiapsiagaan bencana baik berupa Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) atau Rencana Kontinjensi (Renkon) atau Rencana Evakuasi yang sudah memasukan prioritas penyelamatan untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya</p> <p>2. Disahkannya rencana kesiapsiagaan tersebut dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Lurah</p> <p>3. Rencana kesiapsiagaan tersebut digunakan untuk simulasi tanggap darurat bencana dan juga penanganan darurat ketika terjadi bencana</p> <p>4. Ketika terjadi bencana, terlaksananya penanganan darurat yang lebih efektif dan memenuhi kebutuhan semua masyarakat terdampak dengan prioritas penyelamatan untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya</p>		
4	Pendanaan PB	<p>0. Tidak terdapat alokasi dana desa/kelurahan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko bencana dan dana cadangan bencana</p> <p>1. Terdapat identifikasi pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan risiko bencana dan dana cadangan bencana yang telah memasukkan pemenuhan kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya</p> <p>2. Usulan pembiayaan kegiatan pengelolaan risiko bencana dan dana cadangan bencana tersebut telah disampaikan dan didiskusikan dalam MUSRENBANG desa atau MUSRENBANG kecamatan untuk kelurahan</p>		

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-4)	BUKTI/KETERANGAN LAINNYA
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Alokasi pembiayaan kegiatan pengelolaan risiko bencana dan dana cadangan bencana tersebut telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa atau rencana anggaran pemerintah kelurahan 4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko bencana dan dana cadangan bencana tersebut yang diindikasikan melalui Laporan penyerapan anggaran kegiatan pada tahun berjalan 		
5	Kelembagaan PB: Relawan	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak terdapat tim relawan di desa/kelurahan untuk penanggulangan bencana 1. Terbentuknya tim relawan desa/kelurahan untuk penanggulangan bencana, termasuk keterlibatan perwakilan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya 2. Adanya kegiatan peningkatan kapasitas untuk relawan agar bisa menjalankan tugasnya pada pra, saat, dan pasca bencana 3. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pra, saat, dan pasca bencana untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh relawan PB 4. Terlaksananya kegiatan berkala yang diagendakan dan didukung dengan anggaran desa/kelurahan atau anggaran mandiri yang dilaksanakan oleh relawan untuk masyarakat 		
6	Kelembagaan PB: Forum PRB	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak terdapat forum di desa/kelurahan yang menjadi media untuk merencanakan dan melaksanakan penanggulangan bencana 1. Teridentifikasinya kelembagaan/organisasi pemangku kepentingan di desa/kelurahan termasuk organisasi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang bisa digunakan untuk upaya PRB 2. Terbentuknya Forum PRB baik baru atau menambahkan fungsi PRB untuk forum yang sudah ada di desa/kelurahan dengan mempertimbangkan keterwakilan kelompok rentan 3. Forum PRB melakukan upaya pengarusutamaan PRB dalam pembangunan desa dengan terlibat dan memberikan usulan kegiatan dalam musrenbang 4. Terlaksananya perencanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan PB di desa/kelurahan oleh Forum PRB 		

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-4)	BUKTI/KETERANGAN LAINNYA
7	Pengembangan Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> 0. Belum pernah ada sosialisasi atau pelatihan terkait penanggulangan bencana di desa/kelurahan 1. Telah dilakukan kegiatan sosialisasi/pelatihan pengelolaan risiko dan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat desa/kelurahan 2. Telah dilakukan sosialisasi kepada kelompok relawan/tim siaga/perwakilan masyarakat desa/kelurahan yang melibatkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan perempuan terkait kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana 3. Pemerintah dan masyarakat desa/kelurahan telah melakukan simulasi peringatan dini, penyelamatan diri, evakuasi, dan penanganan darurat bencana 4. Pemerintah dan masyarakat desa/kelurahan telah melakukan simulasi peringatan dini, penyelamatan diri, evakuasi, dan penanganan darurat bencana secara berkala setiap tahunnya dengan melibatkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan perempuan 		
8	Aksi PRB: Sistem peringatan dini	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak terdapat sistem peringatan dini bencana yang disepakati di desa/kelurahan 1. Telah disepakatinya sistem peringatan dini di pemerintah dan masyarakat desa/kelurahan untuk jenis ancaman bencana utama yang ada di desa/kelurahan 2. Telah disepakatinya sistem peringatan dini di pemerintah dan masyarakat desa/kelurahan untuk jenis ancaman bencana utama yang ada di desa/kelurahan yang memberikan akses informasi yang mudah dipahami masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya 3. Tersedianya peta evakuasi, rambu jalur evakuasi dan tempat pengungsian yang aman dan bisa diakses oleh penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya 4. Terlaksananya uji peringatan dini dan uji rambu dan tempat evakuasi dalam 		

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-4)	BUKTI/KETERANGAN LAINNYA
		latihan simulasi penyelamatan dan evakuasi mandiri dengan melibatkan semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan		
9	Aksi Pengurangan Risiko Bencana: Mitigasi Struktural	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak terdapat rencana atau pelaksanaan pembangunan fisik untuk mitigasi bencana yang ada di desa/kelurahan 1. Terdapat rencana untuk pembangunan fisik dalam mengurangi risiko bencana 2. Terdapat rencana untuk pembangunan fisik dalam mengurangi risiko bencana yang sudah mempertimbangkan akses dan partisipasi bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaannya 3. Tersedianya sarana dan prasarana fisik untuk mengurangi risiko bencana 4. Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi fisik untuk mengurangi risiko bencana yang sudah memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya 		
10	Aksi PRB: Pola ketahanan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak ada kegiatan di desa/kelurahan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat apabila terdampak bencana 1. Terdapat identifikasi potensi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk membangun pola ketahanan ekonomi dalam menghadapi bencana 2. Terdapat rencana pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk membangun pola ketahanan ekonomi dalam menghadapi bencana baik dalam bentuk usaha ekonomi yang tahan bencana atau mekanisme cadangan untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terkena dampak bencana 3. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan ekonomi yang tahan bencana atau kegiatan mekanisme cadangan untuk bertahan dan bangkit kembali setelah bencana dengan memberikan akses kepada penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya 4. Masyarakat desa/kelurahan memiliki sistem cadangan, misalnya lumbung pangan, koperasi, dan pilihan mata pencaharian yang aman dari bencana, yang bisa memberikan pemenuhan kebutuhan hidup ketika terjadi bencana dan bisa digunakan untuk cepat bangkit kembali setelah bencana 		

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-4)	BUKTI/KETERANGAN LAINNYA
11	Aksi PRB: Perlindungan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak ada rencana atau panduan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan saat darurat bencana di desa/kelurahan 1. Telah mengidentifikasi sumberdaya local dan pihak lain yang untuk menyiapkan pelayanan kesehatan darurat bencana 2. Terdapat kerjasama dengan pihak penyedia layanan kesehatan untuk bisa memberikan layanan kesehatan darurat bencana, dengan prioritas dan memberikan akses untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya 3. Tersedianya panduan/mechanisme/cara pelayanan kesehatan saat darurat bencana, dengan prioritas untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya atas kerjasama dengan pihak penyedia layanan kesehatan 4. Tersedianya sumberdaya manusia, peralatan, obat-obatan, dan tempat untuk memberikan layanan kesehatan saat darurat bencana, dengan prioritas dan akses untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya 		
12	Aksi PRB: Pengelolaan sumberdaya alam	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak terdapat rencana atau panduan untuk pengelolaan sumberdaya alam di desa/kelurahan agar tidak menambah atau agar bisa mengurangi risiko bencana 1. Teridentifikasinya sumber-sumber daya alam yang perlu jaga untuk mengurangi risiko bencana dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk memperkuat ketangguhan masyarakat 2. Tersedianya panduan/rencana pengelolaan sumberdaya alam, seperti hutan, ladang, sawah, sungai, pantai dll, di desa/kelurahan yang berperspektif PRB agar tidak menambah risiko bencana 3. Terdapat Peraturan Desa/Kelurahan atau peraturan adat yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana yang memberikan akses kepada penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya 4. Dilakukannya pengelolaan sumberdaya alam yang memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana dengan melibatkan partisipasi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya 		

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-4)	BUKTI/KETERANGAN LAINNYA
13	Aksi PRB: Perlindungan aset	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak tersedia rencana kegiatan desa/kelurahan untuk melindungi aset masyarakat dari dampak bencana 1. Tersedianya identifikasi aset utama masyarakat yang perlu dilindungi dari dampak bencana dengan memberikan prioritas untuk aset milik penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya 2. Tersedianya rencana pengalihan risiko (asuransi) atau pengumpulan risiko (dana bersama) untuk melindungi aset utama masyarakat, khususnya aset milik penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya 3. Terdapat dokumen kerjasama dengan pihak lain untuk menanggung pengalihan risiko (asuransi) atau untuk mengumpulkan dana bersama yang akan digunakan untuk memulihkan aset ketika terjadi bencana 4. Terdapat pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain untuk menanggung pengalihan risiko (asuransi) atau melakukan pengumpulan dana bersama yang akan digunakan untuk memulihkan aset ketika terjadi bencana 		
14	Kerjasama multi-pihak	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak terdapat kerjasama desa/kelurahan dengan pihak lain untuk pelaksanaan kegiatan terkait dengan pengelolaan risiko bencana 1. Teridentifikasi para pihak di luar desa/kelurahan yang bisa diajak kerjasama untuk meningkatkan ketangguhan desa/kelurahan dalam menghadapi ancaman bencana 2. Terdapat rencana kerjasama multipihak untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka pengelolaan risiko bencana 3. Terdapat kesepakatan kerjasama atau keputusan bersama antar kepala desa/lurah atau MoU atau dengan pihak di luar desa/kelurahan untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka pengelolaan risiko bencana 4. Terlaksananya program atau kegiatan bersama sebagai hasil kerjasama pemerintah desa/kelurahan dengan pihak lain untuk membangun ketangguhan masyarakat, termasuk pelibatan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya 		

DAFTAR HADIR PESERTA & FASILITATOR

Kegiatan : _____

Lokasi, Hari, & Tanggal : _____

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Kesulitan Fungsi terkait Disabilitas*	Organisasi/ Lembaga	Jabatan	Telepon	Tanda Tangan
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

****Kesulitan Fungsi Tubuh:*** melihat/ mendengar/ berjalan atau naik turun tangga/ mengingat/ rawat diri – mandi, berpakaian, dll/ berkomunikasi/ menggunakan tangan dan jari. Bisa 1 kesulitan fungsi atau lebih dari 1 kesulitan fungsi sesuai pengalaman aktivitas sosial keseharian.

INSTRUMEN PENILAIAN CAPAIAN KELUARAN DAN HASIL DESA/NAGARI/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

METODE PENGGUNAAN INSTRUMEN:

Instrumen penilaian capaian keluaran (output) dan hasil (outcome) Desa/Nagari dan Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA/NAGTANA dan KATANA) digunakan dengan metode diskusi bersama pemerintah desa/nagari/keurahan, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa/Badan Musyawarah Nagari, Relawan Desa/Nagari/Kelurahan, Tokoh masyarakat/agama/adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda dan anak, kelompok penyandang disabilitas dan kempk berisiko lainnya, kelompok tani/nelayan/pedagang/industri, dan perwakilan lembaga lain di desa/nagari/kelurahan. Keseluruhan peserta antara 25 – 35 orang.

Kegiatan diskusi ini perlu difasilitasi oleh 2-4 orang dengan tugas memfasilitasi diskusi kelompok dan juga diskusi bersama seluruh peserta untuk membuat kesepakatan hasil penilaian serta mencatat dan mendokumentasikan hasil-hasil diskusi.

Fasilitator diskusi dapat berasal dari unsur perwakilan pemerintah desa, masyarakat dan jika diperlukan juga dari pihak luar desa dari unsur pemerintah dan lembaga non pemerintah dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya manusia dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda dan lansia yang bertujuan melakukan penilaian ketangguhan desa/nagari/kelurahan secara inklusi.

Penilaian mandiri oleh pihak desa/nagari/kelurahan bersama masyarakatnya diutamakan dengan melaporkan informasi hasil-hasil penilaian kepada BPBD Kabupaten/Kota.

Alur diskusi penilaian ialah:

1. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok dengan fokus diskusi sebagai berikut:
 - a. Kelompk 1: indikator 1, 2, 3, dan 4
 - b. Kelompok 2: indikator 5, 6, 7, dan 14
 - c. Kelompok 3: indikator 8, 9, 10, 11, 12, dan 13
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan untuk memberikan skor atas skala ukuran indikator dengan memberikan bukti/keterangan sebagai dasar pemberian skor tersebut.
3. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penilaian indikator, dan dibahas serta didiskusikan bersama dengan kelompok lain. Nilai akhir yang disepakati bersama seluruh peserta menjadi nilai penilaian indikator tersebut.
4. Hasil penilaian direkap untuk mendapatkan hasil penilaian secara keseluruhan indikator capaian output dan outcome desa/nagari/kelurahan tangguh bencana.

INSTRUMEN PENILAIAN:

Desa/Nagarai/Kelurahan:	
Kecamatan:	
Kabupaten/Kota:	
Provinsi:	
Peserta FGD:	Terlampir dalam daftar hadir
Fasilitator FGD:	1. Laki-laki/Perempuan 2. Laki-laki/Perempuan 3. Laki-laki/Perempuan 4. Laki-laki/Perempuan
Tanggal:	
Tempat FGD:	

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-5)	BUKTI/KETERANGAN LAINNYA
1	Regulasi terkait Penanggulangan Bencana	0. Tidak ada regulasi di desa/nagari/kelurahan yang mengatur tentang penanggulangan bencana 1. Terdapat draf Peraturan Desa/Nagari tentang Penanggulangan Bencana (untuk Kelurahan, terdapat draf SOP penanganan bencana sesuai Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana) 2. Terbitnya Peraturan Desa/Nagari tentang Penanggulangan Bencana yang sudah disahkan (untuk Kelurahan, terdapat Keputusan Lurah tentang SOP penanganan bencana sesuai dengan tugas kelurahan dalam Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana) 3. Terakomodasinya hak, kewajiban dan kebutuhan kelompok penyandang disabilitas dan kelompok bersiko lainnya dalam Peraturan Desa/Nagari tentang Penanggulangan Bencana yang sudah disahkan (untuk Kelurahan, terdapat Keputusan Lurah tentang SOP penanganan bencana sesuai dengan tugas kelurahan dalam Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana) 4. Sebagian besar masyarakat desa/nagari/kelurahan, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya, sudah mengetahui ketentuan-		

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-5)	BUKTI/KETERANGAN LAINNYA
		<p>ketentuan dalam Peraturan Desa/Nagari/Keputusan Lurah tersebut untuk penanggulangan bencana di desa/nagari/kelurahan</p> <p>5. Peraturan Desa/Nagari/Keputusan Lurah tersebut sudah digunakan sebagai rujukan legal untuk penyusunan rencana penanggulangan bencana, rencana kesiapsiagaan bencana, dan pengalokasian anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana</p>		
2	Perencanaan PB:Penanggulangan Bencana	<p>0. Tidak ada rencana penanggulangan bencana di desa/nagari/kelurahan</p> <p>1. Tersedianya peta dan hasil kajian risiko bencana di desa/nagari/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat</p> <p>2. Terdapat dokumen draf Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) desa/kelurahan yang sudah memasukan rencana aksi PRB</p> <p>3. Disahkannya dokumen RPB desa/kelurahan melalui Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Lurah</p> <p>4. Adanya keterlibatan kelompok penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya, serta termuatnya data terpilah dalam pembuatan peta dan kajian risiko bencana serta dokumen RPB di desa/nagari/kelurahan.</p> <p>5. Kegiatan rencana aksi dalam dokumen RPB sudah masuk dalam dokumen RPJMDesa/RPJMNagari atau RKP Desa/Nagari atau rencana kegiatan tahunan Kelurahan</p>		
3	Perencanaan PB: Rencana Kesiapsiagaan Bencana	<p>0. Tidak ada rencana kesiapsiagaan bencana di desa/nagari/kelurahan</p> <p>1. Terdapat dokumen rencana kesiapsiagaan bencana baik berupa Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) atau Rencana Kontinjensi (Renkon) atau Rencana Evakuasi</p> <p>2. Disahkannya rencana kesiapsiagaan tersebut dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Wali Nagari atau Keputusan Lurah</p> <p>3. Termuatnya prioritas penyelamatan untuk penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya dalam dokumen rencana kesiapsiagaan bencana baik berupa Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) atau Rencana Kontinjensi (Renkon) atau Rencana Evakuasi</p>		

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-5)	BUKTI/KETERANGAN LAINNYA
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Rencana kesiapsiagaan tersebut digunakan untuk simulasi tanggap darurat bencana dan juga penanganan darurat ketika terjadi bencana 5. Ketika terjadi bencana, terlaksananya penanganan darurat yang lebih efektif dan memenuhi kebutuhan semua masyarakat terdampak dengan prioritas penyelamatan untuk penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya 		
4	Pendanaan PB	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak terdapat alokasi dana desa/nagari/kelurahan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko bencana dan dana cadangan bencana 1. Terdapat identifikasi pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan risiko bencana dan dana cadangan bencana 2. Usulan pembiayaan kegiatan pengelolaan risiko bencana dan dana cadangan bencana tersebut telah disampaikan dan didiskusikan dalam MUSRENBANG Desa atau MUSRENBANG Nagari atau MUSRENBANG kecamatan untuk kelurahan 3. Alokasi pembiayaan kegiatan pengelolaan risiko bencana dan dana cadangan bencana tersebut telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa atau rencana anggaran pemerintah kelurahan 4. Termuatnya pemenuhan kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya dalam alokasi pembiayaan kegiatan pengelolaan risiko bencana dan dana cadangan bencana 5. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko bencana dan dana cadangan bencana tersebut yang diindikasikan melalui Laporan penyerapan anggaran kegiatan pada tahun berjalan 		
5	Kelembagaan PB: Relawan	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak terdapat tim relawan di desa/nagari/kelurahan untuk penanggulangan bencana 1. Terbentuknya tim relawan desa/nagari/kelurahan untuk penanggulangan bencana 2. Adanya keterlibatan perwakilan penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya dalam tim relawan desa/nagari/kelurahan untuk penanggulangan bencana 		

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-5)	BUKTI/KETERANGAN LAINNYA
		<ul style="list-style-type: none"> 3. Adanya kegiatan peningkatan kapasitas untuk relawan agar bisa menjalankan tugasnya pada pra, saat, dan pasca bencana 4. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pra, saat, dan pasca bencana untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh relawan PB 5. Terlaksananya kegiatan berkala yang diagendakan dan didukung dengan anggaran desa/nagari/kelurahan atau anggaran mandiri yang dilaksanakan oleh relawan untuk masyarakat 		
6	Kelembagaan PB: Forum PRB	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak terdapat forum di desa/nagari/kelurahan yang menjadi media untuk merencanakan dan melaksanakan penanggulangan bencana 1. Teridentifikasinya kelembagaan/organisasi pemangku kepentingan di desa/kelurahan salah satunya organisasi penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya yang bisa digunakan untuk upaya PRB 2. Terbentuknya Forum PRB baik baru atau menambahkan fungsi PRB untuk forum yang sudah ada di desa/nagari/kelurahan 3. Adanya keterlibatan perwakilan kelompok penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya dalam Forum PRB di desa/nagari/kelurahan 4. Forum PRB melakukan upaya pengarusutamaan PRB dalam pembangunan desa dengan terlibat dan memberikan usulan kegiatan dalam MUSRENBANG 5. Terlaksananya perencanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan PB di desa/nagari/kelurahan oleh Forum PRB 		
7	Pengembangan Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> 0. Belum pernah ada sosialisasi atau pelatihan terkait penanggulangan bencana di desa/nagari/kelurahan 1. Telah dilakukan kegiatan sosialisasi/pelatihan pengelolaan risiko dan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat desa/nagari/kelurahan 2. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan kepada kelompok relawan/tim siaga/perwakilan masyarakat desa/nagari/kelurahan yang melibatkan kelompok berisiko seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan perempuan terkait kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana 3. Adanya kesempatan dari perwakilan kelompok penyandang disabilitas atau 		

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-5)	BUKTI/KETERANGAN LAINNYA
		<p>berisiko lainnya menjadi pelatih/fasilitator dalam memberikan sosialisasi/pelatihan tentang pengelolaan risiko dan kesiapsiagaan bencana.</p> <p>4. Pemerintah dan masyarakat desa/nagari/kelurahan telah melakukan simulasi peringatan dini, penyelamatan diri, evakuasi, dan penanganan darurat bencana</p> <p>5. Pemerintah dan masyarakat desa/nagari/kelurahan telah melakukan simulasi peringatan dini, penyelamatan diri, evakuasi, dan penanganan darurat bencana secara berkala setiap tahunnya dengan melibatkan kelompok berisiko seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan perempuan</p>		
8	Aksi PRB: Sistem peringatan dini	<p>0. Tidak terdapat sistem peringatan dini bencana yang disepakati di desa/nagari/kelurahan</p> <p>1. Telah disepakatinya sistem peringatan dini di pemerintah dan masyarakat desa/nagari/kelurahan untuk jenis ancaman bencana utama yang ada di desa/nagari/kelurahan</p> <p>2. Tersedianya sistem peringatan dini, peta evakuasi, rambu jalur evakuasi dan tempat pengungsian yang aman dan bisa diakses oleh masyarakat</p> <p>3. Tersedianya peta evakuasi, rambu jalur evakuasi dan tempat pengungsian yang aman, bisa diakses dan memberikan akses informasi yang mudah dipahami oleh penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya.</p> <p>4. Terlaksananya uji peringatan dini, uji rambu dan tempat evakuasi dalam latihan simulasi penyelamatan dan evakuasi mandiri</p> <p>5. Terlibatnya kelompok berisiko termasuk penyandang disabilitas dalam pelaksanaan uji peringatan dini, uji rambu dan tempat evakuasi dalam latihan simulasi penyelamatan dan evakuasi mandiri di masyarakat</p>		
9	Aksi Pengurangan Risiko Bencana: Mitigasi Struktural	<p>0. Tidak terdapat rencana atau pelaksanaan pembangunan fisik untuk mitigasi bencana yang ada di desa/nagari/kelurahan</p> <p>1. Terdapat rencana untuk pembangunan fisik dan penyediaan sarana prasarana mitigasi fisik dalam rangka untuk mengurangi risiko bencana</p> <p>2. Terdapat rencana untuk pembangunan fisik dan penyediaan sarana prasarana mitigasi fisik dalam rangka untuk mengurangi risiko bencana yang sudah</p>		

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-5)	BUKTI/KETERANGAN LAINNYA
		<p>mempertimbangkan askes dan partisipasi bagi kelompok berisiko termasuk penyandang disabilitas dalam proses perencanaannya</p> <p>3. Terlaksananya pembangunan fisik dalam rangka untuk mengurangi risiko bencana</p> <p>4. Tersedianya sarana dan prasarana fisik untuk mengurangi risiko bencana</p> <p>5. Terselenggaranya pembangunan fisik dan juga tersedianya sarana dan prasarana mitigasi fisik untuk mengurangi risiko bencana yang sudah memberikan kemudahan akses bagi kelompok berisiko termasuk penyandang disabilitas</p>		
10	Aksi PRB: Pola ketahanan ekonomi	<p>0. Tidak ada kegiatan di desa/nagari/kelurahan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat apabila terdampak bencana</p> <p>1. Terdapat identifikasi potensi kegiatan pemberdayaan ekonomi dan rencana pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk membangun pola ketahanan ekonomi dalam menghadapi bencana</p> <p>2. Terdapat rencana pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk membangun pola ketahanan ekonomi dalam menghadapi bencana baik dalam bentuk usaha ekonomi yang tahan bencana atau mekanisme cadangan untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terkena dampak bencana</p> <p>3. Terdapat rencana pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk membangun pola ketahanan ekonomi dalam menghadapi bencana baik dalam bentuk usaha ekonomi yang tangguh bencana atau mekanisme cadangan untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terkena dampak bencana yang sudah mempertimbangkan askes dan partisipasi bagi kelompok berisiko termasuk penyandang disabilitas dalam proses perencanaannya</p> <p>4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan ekonomi yang tahan bencana atau kegiatan mekanisme cadangan untuk bertahan dan bangkit kembali setelah bencana dengan memberikan akses kepada penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya</p> <p>5. Masyarakat desa/kelurahan memiliki sistem cadangan, misalnya lumbung pangan, koperasi, dan pilihan mata pencaharian yang aman dari bencana, yang</p>		

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-5)	BUKTI/KETERANGAN LAINNYA
		bisa memberikan pemenuhan kebutuhan hidup ketika terjadi bencana dan bisa digunakan untuk cepat bangkit kembali setelah bencana		
11	Aksi PRB: Perlindungan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak ada rencana atau panduan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan saat darurat bencana di desa/nagari/kelurahan 1. Telah teridentifikasi sumber daya lokal dan pihak lain yang dapat mendukung dan memfasilitasi penyiapan pelayanan kesehatan darurat bencana 2. Terdapat kerjasama dengan pihak penyedia layanan kesehatan untuk bisa memberikan layanan kesehatan darurat bencana 3. Tersedianya panduan/mekanisme/cara pelayanan kesehatan saat darurat bencana 4. Tersedianya panduan/mekanisme/cara pelayanan kesehatan saat darurat bencana kepada masyarakat, dengan prioritas untuk penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya atas kerjasama dengan pihak penyedia layanan kesehatan 5. Tersedianya sumberdaya manusia, peralatan, obat-obatan, dan tempat untuk memberikan layanan kesehatan saat darurat bencana, dengan prioritas dan akses untuk penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya 		
12	Aksi PRB: Pengelolaan sumberdaya alam	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak terdapat rencana atau panduan untuk pengelolaan sumberdaya alam di desa/nagari/kelurahan agar tidak menambah atau agar bisa mengurangi risiko bencana 1. Teridentifikasinya sumber-sumber daya alam yang perlu dijaga untuk mengurangi risiko bencana dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk memperkuat ketangguhan masyarakat 2. Tersedianya panduan/rencana pengelolaan sumberdaya alam, seperti hutan, ladang, sawah, sungai, pantai dll, di desa/nagari/kelurahan berbasis PRB agar tidak menambah risiko bencana 3. Terdapat Peraturan Desa/Nagari/Kelurahan atau peraturan adat yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana 		

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-5)	BUKTI/KETERANGAN LAINNYA
		<p>4. Dilakukannya pengelolaan sumberdaya alam yang memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana dengan melibatkan partisipasi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya</p> <p>5. Terlibatnya kelompok berisiko termasuk penyandang disabilitas dalam menyusun panduan/rencana pengelolaan sumberdaya alam dan juga dalam penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam yang memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana berprespektif inklusi dengan diperkuat melalui legalisasi Peraturan Desa/Nagari/Kelurahan.</p>		
13	Aksi PRB: Perlindungan aset	<p>0. Tidak tersedia rencana kegiatan desa/kelurahan untuk melindungi aset masyarakat dari dampak bencana</p> <p>1. Tersedianya identifikasi aset utama masyarakat yang perlu dilindungi dari dampak bencana termasuk aset yang dimiliki kelompok penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya</p> <p>2. Tersedianya rencana pengalihan risiko (asuransi) atau pengumpulan risiko (dana bersama) untuk melindungi aset utama masyarakat,</p> <p>3. Terdapat dokumen kerjasama dengan pihak lain untuk menanggung pengalihan risiko (asuransi) atau untuk mengumpulkan dana bersama yang akan digunakan untuk memulihkan aset ketika terjadi bencana</p> <p>4. Terdapat pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain untuk menanggung pengalihan risiko (asuransi) atau melakukan pengumpulan dana bersama yang akan digunakan untuk memulihkan aset ketika terjadi bencana</p> <p>5. Terlibatnya kelompok berisiko termasuk penyandang disabilitas dalam penyusunan rencana prioritas perlindungan aset utama yang dimiliki kelompok berisiko termasuk penyandang disabilitas, maupun pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain untuk menanggung pengalihan risiko (asuransi) atau melakukan pengumpulan dana bersama yang akan digunakan untuk memulihkan aset ketika terjadi bencana</p>		
14	Kerjasama multi-pihak	<p>0. Tidak terdapat kerjasama desa/nagari/kelurahan dengan pihak lain untuk pelaksanaan kegiatan terkait dengan pengelolaan risiko bencana</p> <p>1. Teridentifikasi para pihak di luar desa/nagari/kelurahan yang bisa diajak</p>		

NO	INDIKATOR	SKALA UKURAN INDIKATOR	SKOR (0-5)	BUKTI/KETERANGAN LAINNYA
		<p>kerjasama untuk meningkatkan ketangguhan desa/nagari/kelurahan dalam menghadapi ancaman bencana</p> <p>2. Terdapat rencana kerjasama multipihak untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka pengelolaan risiko bencana</p> <p>3. Terdapat kesepakatan kerjasama atau keputusan bersama antar kepala desa/wai nagari/lurah atau MoU dengan pihak di luar desa/nagari/kelurahan untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka pengelolaan risiko bencana</p> <p>4. Terjalannya kerjasama yang kuat secara sah dan berkekuatan hukum dengan berbagai pihak di luar desa/nagari/kelurahan termasuk dengan organisasi penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka pengelolaan risiko bencana berprinsip inklusi</p> <p>5. Terlaksananya program atau kegiatan bersama sebagai hasil kerjasama pemerintah desa/kelurahan dengan pihak lain untuk membangun ketangguhan masyarakat, termasuk pelibatan penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya</p>		

DAFTAR HADIR PESERTA & FASILITATOR

Kegiatan : _____

Lokasi, Hari, & Tanggal : _____

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Kesulitan Fungsi terkait Disabilitas*	Organisasi/ Lembaga	Jabatan	Telepon	Tanda Tangan
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

****Kesulitan Fungsi Tubuh:*** melihat/ mendengar/ berjalan atau naik turun tangga/ mengingat/ rawat diri – mandi, berpakaian, dll/ berkomunikasi/ menggunakan tangan dan jari. Bisa 1 kesulitan fungsi atau lebih dari 1 kesulitan fungsi sesuai pengalaman aktivitas sosial keseharian.